

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

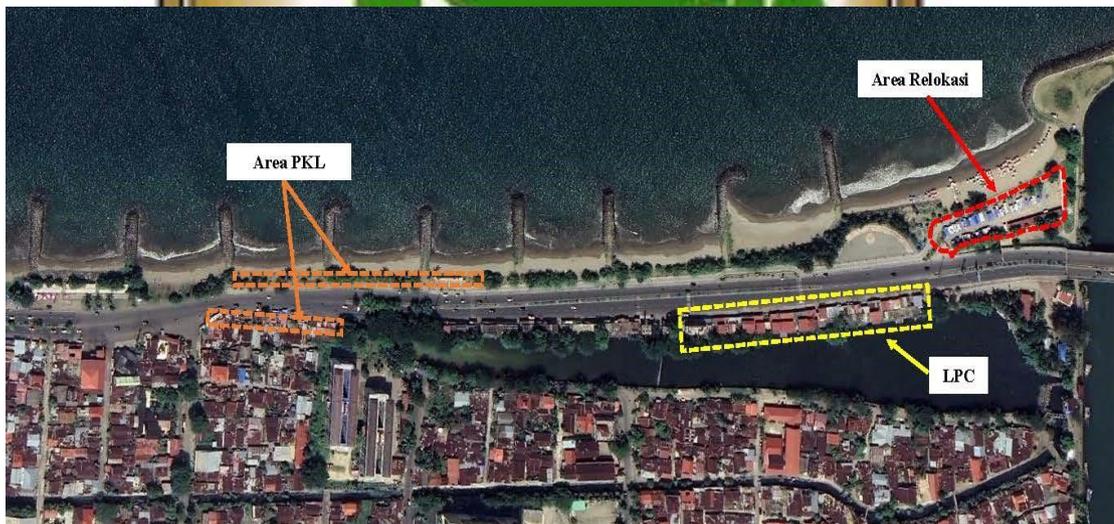
Pariwisata adalah usaha masyarakat yang dilakukan dan dihasilkan oleh berbagai lembaga, organisasi, asosiasi, dan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan tertentu dan memberikan pengaruh sosial, budaya, ekonomi, dan politik terhadap individu, kelompok sosial, dan masyarakat yang lebih luas (Pradana, 2019). Pariwisata dapat dianggap sebagai penyebab perubahan pembangunan karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi negara (Yoeti, 2008).

Pariwisata memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong berbagai sektor ekonomi nasional. Hal ini dicapai melalui perluasan infrastruktur dan fasilitas pariwisata, yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan aktivitas ekonomi. Mengembangkan sektor-sektor baru yang terkait dengan pariwisata (Rudy & Mayasari, 2019). Indonesia terkenal dengan tempat-tempat wisata yang populer, yang telah mendapatkan pengakuan dunia. Ini termasuk Danau Toba di Sumatera, Pulau Mentawai di Padang, Sungai Mahakam di Kalimantan, Pulau Komodo di Labuan Bajo-NTT, Pulau Bali yang indah, Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Taman Laut Bunakendi di Sulawesi, Raja Ampat di Papua, Gunung Bromo di Jawa Timur, dan berbagai keajaiban alam lainnya yang terkenal di Indonesia (Bobsuni & Ma'ruf, 2021).

Sumber daya alam sangat rentan terhadap konflik. Sumber daya alam memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara ekonomi, tetapi pemanfaatannya dapat merusak lingkungan dan membahayakan manusia. Daya tarik wisata alam akan

rusak jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal untuk memperoleh keuntungan secara bertahap. Pembangunan bisnis pariwisata tidak mungkin dilakukan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas sumber daya alam (Sulistyo, 2023).

Fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi kualitatif dan guna memilih data mana yang relevan dan tidak relevan (Moleong, 2010). Penelitian ini akan difokuskan pada perilaku kolektif PKL Pantai Padang mewujudkan kepentingan dalam penataan PKL yang menjadi objek utamanya yaitu PKL yang ada Pantai Padang, karena fokus penelitian ini ingin mengetahui perilaku dan dengan cara apa yang dilakukan oleh PKL dalam mempertahankan tempat berjualannya.



Gambar 1. 1 Peta Kawasan Pantai Muaro Lasak

Sumber : Google Earth

Di Kota Padang memiliki beberapa objek wisata yaitu wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah, wisata belanja, dan wisata kuliner. Salah satu objek wisata bahari Kota Padang yang ramai dikunjungi oleh wisatawan adalah Pantai Purus. Jumlah pengunjung pada saat liburan di Pantai Purus bisa mencapai ribuan orang

dengan puncak ramainya itu menjelang matahari terbenam. Setiap libur nasional, seperti lebaran, sepanjang sisi jalan pantai dipadati oleh kendaraan bermotor ataupun mobil yang dibawa oleh para pengunjung pantai. Untuk melihat keindahan alamnya tidak perlu mengeluarkan biaya karena tidak dipungut biaya dan mudah dijangkau (Surinanda & May, 2022).

Menurut Bapak Tri Pria Anugrah, selaku Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, objek wisata ini menarik perhatian pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang. Selain PKL, terdapat pula pelayanan pariwisata yang disediakan oleh pedagang di ruko. Jumlah Lapau Panjang Cimpago (LPC) terdiri dari 120 ruko, sementara PKL yang terdapat dari Hotel MY ALL hingga jembatan Danau Cimpago mencapai sekitar 200 pedagang. Namun, data yang diberikan kepada Dinas Pariwisata Kota Padang itu tidak benar, informasi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang jumlah PKL yang terdapat itu hanya sekitar 80 pedagang.

Peraturan Daerah Kota Padang dalam Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Perizinan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya dengan menggunakan tempat niaga bergerak atau tetap. PKL yang berdagang memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik untuk pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil (Pramono et al., 2021). Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berjualan di emperan toko dan trotoar yang memakai alat dagangan maupun pedagang yang memakai gerobak atau pikulan (Permadi, 2007).

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti Nela Vera Septiani, Lucky Zamzami, dan Syahrizal mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) di

kawasan Pantai Padang. Melaporkan bahwa PKL memberikan banyak pengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yang tinggal disekitar pantai (Septiani et al., 2020) .

Pemerintah Kota Padang melakukan penertiban karena selama ini PKL menempati tempat – tempat yang dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban (Pramono et al., 2021). Penyebab yang terjadi karna PKL berdagang memakan bibir jalan yaitu sering terjadinya kemacetan di Pantai Padang dan juga pejalan kaki sulit untuk berjalan di trotoar yang mengakibatkan kenyamanan pengunjung menjadi berkurang. Keberadaan PKL yang tidak teratur pun dapat mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan (Pertiwi & Achnes, 2014). Pemerintah melakukan penertiban ini namun, tidak memberikan solusi yang tepat dan tetap untuk berdagang, tempat yang ditawarkan untuk relokasi kurang memadai untuk para PKL sehingga menyebabkan penjualan menjadi berkurang (Pramono et al., 2021).

Pada tanggal 17 Agustus 2022, terjadi bentrok di Pantai Purus antara pedagang kaki lima dan petugas pamong. Seperti yang dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, konfrontasi tersebut berujung pada pelemparan batu dan perkelahian yang mengakibatkan banyak korban luka, termasuk anak-anak dan pengunjung pantai.

Pada tahun 2023, pemerintah Kota Padang menertibkan para PKL. Penertiban penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah agar para wisatawan nyaman untuk berwisata ke Pantai Padang dan bisa menikmati keindahan laut dengan bebas (Pramono et al., 2021). Pemerintah melakukan pengawasan terhadap



PKL agar tertib dan juga menjaga ketentraman masyarakat, karena masih banyak PKL yang tidak memiliki surat pemakaian lahan namun, tetap berjualan di kawasan Pantai Padang. PKL di gusur bukan karna tidak boleh berjualan namun, dipindahkan ke tempat berjualan yang seharusnya tanpa mengganggu akses jalan pejalan kaki. Pengawasan ini dilakukan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan tersebut dan memperbaiki jika terdapat kesalahan (Pertivi & Achmes, 2014).

Pemerintah telah berusaha untuk menertibkan PKL sejak lama, mereka tetap ingin berjualan di tempat – tempat keramaian. PKL merasakan dampak dari banyak kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan ketertiban dan keindahan kota. PKL sering menjadi korban penggusuran oleh Satpol PP dan mengalami banyak kerugian, baik materil maupun non-materil. PKL mempertahankan tempat dagangan mereka meskipun telah digusur atau ditertibkan. Mereka melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, karena tempat berdagang yang mereka tempati ini menghasilkan pendapatan yang tinggi (Pramono et al., 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Para PKL menentang relokasi tempat berdagang yang dilakukan oleh pemerintah, sementara pemerintah Kota Padang tetap berusaha menertibkan tempat berjualan para pedagang ke lahan parkir sebelum Jembatan Pantai Purus Padang. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa perilaku kolektif yang dilakukan oleh para PKL untuk mewujudkan kepentingan mereka yaitu tetap berdagang seperti biasa di sepanjang trotoar Pantai Muaro Lasak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan perilaku kotektif PKL dalam mempertahankan tempat berjualan terkait dengan penataan PKL oleh Pemerintah Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan aktivitas – aktivitas PKL untuk mewujudkan kepentingannya .
2. Mendeskripsikan keberhasilan PKL mewujudkan kepentingannya.
3. Mendeskripsikan pengorganisasian para pedagang dalam mempengaruhi pemerintah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosiologi, khususnya pada tindakan sosial berupa pengayaan, konsep, penemuan betapa pentingnya ulasan mengenai tindakan sosial yang di lakukan PKL untuk mempertahankan kepentingannya dalam penataan PKL di Pantai Padang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar Pantai Padang. Khususnya PKL dalam menggunakan wilayah kawasan sekitar Pantai Padang untuk bejualan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pemecahan masalah untuk semua pihak agar dapat mengalokasikan kawasan sekitar Pantai Padang agar menjadi



suatu tempat rekreasi bagi masyarakat dalam maupun luar daerah.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pedagang Kaki Lima

Menurut Sugiharsono, pedagang adalah sebagai perantara yang bekerja atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjual barang dalam partai kecil persatuan. Menurut Widodo, pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan tujuan untuk dijual, diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang telah berubah menjadi barang lain.

Pedagang Kaki Lima kini memiliki tempat berjualan yang tidak terbatas berukuran lima kaki (1,5 meter), tetapi disesuaikan dengan lahan yang ada atau lahan yang dibutuhkan. PKL ada di mana pun yang mungkin menghasilkan untung. Selain itu, lokasinya pun bukan hanya di trotoar dan emperan toko. Namun, sudah meluas hingga ke pinggir jalan maupun lahan kosong (Permadi, 2007).

Ada beberapa jenis – jenis perlengkapan yang digunakan oleh PKL seperti, gerobak, lapak, pikulan, dan juga gendongan. Biasanya mereka membuat sendiri perlengkapannya sehingga biaya yang dikeluarkan tidak mahal. Berikut macam – macam perlengkapan para PKL yaitu :

1. Gerobak

Gerobak sepeda dan gerobak dorong adalah dua jenis gerobak yang biasa digunakan oleh PKL. Gerobak sepeda memiliki tiga roda, sedangkan gerobak dorong memiliki dua roda dan satu cagak penahan di bagian depan.

2. Lapak



Lapak adalah sejenis kios kecil dengan struktur bangunan terbuat dari kayu, triplek, dan bambu. Ada dua jenis lapak PKL, yang tidak permanen dan semi permanen. Yang tidak permanen dibongkar dan dibawa pulang. Sedangkan semi permanen, rangka kios kayu yang digunakan untuk menjual ditutup dengan terpal, dan kemudian dibuka lagi jika akan berjualan kembali.

3. Pikulan

PKL yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan, yang biasanya masih banyak di daerah - daerah seperti, penjual bakso, bakwan, dan siomay. Mereka berkeliling dari rumah ke rumah untuk menjajakan jualannya.

4. Gendongan

Gendongan ini pada umumnya digunakan oleh penjual jamu tradisional. Para pedagang kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.

5. Sepeda

Ada juga PKL yang memakai sepeda untuk berjualan. Sepeda yang mereka gunakan biasanya adalah sepeda tua, atau sepeda kumbang, yang diubah bagian belakangnya sehingga dapat digunakan untuk menyimpan barang dagangannya (Permadi, 2007).



1.5.2 Perilaku Pedagang Kaki Lima

Menurut Babakus, Perilaku tenaga penjual adalah evaluasi dari berbagai aktivitas dan strategi yang digunakan oleh tenaga penjual ketika melakukan tanggung jawab pekerjaannya (Babakus et al., 1996). Pemerintah memiliki tugas

menentukan lokasi dagangan di tepi pantai, karena keputusan yang salah dapat menyebabkan masalah dalam kinerja pasar. Memilih lokasi ditepi pantai merupakan keputusan yang penting untuk memudahkan pelanggan bereaksi setiap waktunya. Menurut Tjiptono (2017), ada beberapa faktor pertimbangan dalam menentukan lokasi seperti :

1. Akses, misalnya lokasi yang dapat diakses dengan mudah atau dijangkau oleh sarana transportasi umum.
2. Visibilitas, misalnya lokasi dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan.
3. Tempat parkir yang luas dan aman.
4. Ekspansi, yaitu memiliki tempat yang cukup luas untuk ekspansi bisnis di masa mendatang.
5. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan.

Untuk menjaga lingkungan pantai tetap baik, kebijakan akan meningkatkan persaingan di wilayah pantai dengan membangun infrastruktur yang baik, termasuk layanan kesehatan dan kebersihan yang layak. Kotler & Armstrong (2001) menyatakan bahwa peningkatan produk dan peningkatan kualitas adalah komponen penting dari strategi pemasaran. Pedagang harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli (konsumen) dengan berbagai cara misalnya menawarkan harga yang terjangkau, menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, dan melayani konsumen dengan ramah. Namun, kenyataan yang ada di Kawasan Pantai Padang masih kurang dari yang seharusnya. Produk yang dijual hanya untuk konsumen menengah kebawah dan terbatas pada produk kebutuhan sehari-hari atau barang primer.



1.5.3 Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan lokasi untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Pramono et al., 2021).

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL yang tercantum dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2014 adalah untuk:

- a) Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat
- c) Mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan pembinaan PKL.

Pedagang Kaki Lima didudukkan sebagai pelaku usaha yang menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Berdasarkan lokasinya, pedagang kaki lima di tempatkan pada lokasi PKL yang bersifat permanen (tetap) dan diperuntukkan untuk bidang usaha tertentu. Sedangkan PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat berdagang PKL yang terjadwal dan bersifat sementara (Pramono et al., 2021).



1.5.4 Perspektif Sosiologi

Definisi Smelser, menyatakan bahwa tingkah laku kolektif adalah mobilisasi berlandaskan pandangan yang mendefinisikan kembali tindakan sosial. Definisi Perry dan Paugh, menyatakan bahwa perilaku kolektif adalah pola – pola interaksi, yang secara relatif tidak terorganisasi dalam kelompok manusia (Horton & Hunt, 1984). Faktor – faktor penentu (determinan) menurut pandangan Smelser adalah sebagai berikut :

1. *Kesesuaian struktural (structural conduciveness)*

Struktur masyarakat dapat menunjang atau menghalangi munculnya perilaku kolektif. Masyarakat tradisional yang sederhana lebih sulit melahirkan perilaku kolektif dibandingkan dengan masyarakat modern.

2. *Ketegangan struktural (structural strain)*

Pencabutan hak dan kekhawatiran akan hilangnya sesuatu merupakan akar penyebab timbulnya perilaku kolektif. Perasaan adanya ketidakadilan mendorong banyak orang untuk melakukan tindakan ekstrim. Kelas sosial bawah, kelompok minoritas tertekan, dan kelompok yang hasil jerih payahnya terancam, serta kelompok sosial atas khawatir yang akan kehilangan hak – hak istimewanya, merupakan kelompok manusia yang berkemungkinan melahirkan perilaku kolektif.

3. *Kemunculan dan penyebaran pandangan*

Sebelum suatu perilaku kolektif muncul, para pelaku perilaku kolektif harus memiliki pandangan yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar, dan cara pencapaian jalan keluar tersebut.



4. Faktor pemercepat (*Precipitating Factors*)

Suatu peristiwa dramatis atau desas – desus mempercepat munculnya perilaku kolektif. Teriakan pada masyarakat yang kebencian rasialnya tinggi, dapat mengakibatkan timbulnya kerusuhan. Seseorang yang tiba – tiba berlari juga dapat mengawali timbulnya kericuhan.

5. Mobilisasi tindakan

Upaya atau langkah – langkah yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Para pemimpin, memulai, menyarankan, dan mengarahkan suatu kegiatan.

6. Pelaksanaan Kontrol sosial

Semua faktor diatas dapat dipengaruhi oleh para pemimpin, kekuatan polisi, propaganda, perubahan kebijakan pemerintah dan lembaga legislatif (Horton & Hunt, 1984)

Pemimpin dalam suatu organisasi gerakan sosial, memiliki risiko dan tanggung jawab yang lebih besar daripada para anggotanya, namun mereka juga akan menerima keuntungan yang lebih besar atas keberhasilan suatu gerakan sosial. Para Pemimpin biasanya mendapatkan keuntungan dalam hal status, wewenang dan juga dalam hal kekayaan, atas posisinya dalam suatu organisasi gerakan sosial. Pemimpin gerakan (*leaders movement*) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (*strategic decision makers*) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial (Sukmana, 2016). Menurut Singh, teori mobilisasi sumberdaya yang berbasiskan rasionalitas, tetaplh sebuah teori



yang tidak persis dan tidak mencukupi. Dari uraian teori mobilisasi sumberdaya, ada beberapa faktor – faktor determinan dalam suatu gerakan sosial, yaitu:

1. Organisasi gerakan sosial

Menurut Bernard (Horton & Hunt, 1984), organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Arnold dan Feldman (1986:5) menyebutkan bahwa karakteristik dari semua tipe organisasi ditandai oleh tiga faktor, yaitu: (1) organisasi terdiri dari individu – individu dan kelompok; (2) organisasi diarahkan untuk mencapai suatu tujuan; dan (3) organisasi agar bisa mencapai tujuannya maka menerapkan koordinasi dan spesialisasi.

Terdapat berbagai tipe dari organisasi gerakan sosial. (Della Porta & Diani, 2020) membagi tipe – tipe organisasi gerakan sosial yaitu :

a) Organisasi gerakan profesional (*Professional movement organization*)

Menurut McCarthy dan Zald organisasi gerakan profesional ditandai dengan: (1) kepemimpinan yang mencurahkan seluruh waktunya untuk suatu gerakan, dengan sebagian besar sumberdaya yang berasal dari luar kelompok yang dirugikan dimana gerakan diklaim mewakilinya; (2) basis keanggotaannya sangat sedikit (terbatas), tidak nyata, atau hanya keanggotaan diatas kertas saja; (3) bertujuan membangun atau menyampaikan citra, “berbicara untuk konstituen”; dan (4) bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan ke arah yang sama dengan yang diinginkan konstituen (Della Porta & Diani, 2020)

b) Organisasi gerakan partisipatif (*participatory movement organization*)

Memiliki dua model, yaitu (1) organisasi protes massa, model ini memadukan perhatian terhadap demokrasi partisipatif melalui level tertentu dari

formalisasi struktur organisasi: dan (2) organisasi akar rumput, mengkombinasi orientasi partisipasi yang kuat dengan level struktur formal yang rendah (Della Porta & Diani, 2006).

2. Pemimpin dan kepemimpinan
3. Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya
4. Jaringan dan partisipasi
5. Peluang dan kapasitas masyarakat

Pada penelitian ini, teori perilaku kolektif yang dikembangkan oleh Smelser dapat membantu penulis memecahkan masalah dalam penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami aktivitas – aktivitas, perorganisasian, dan keberhasilan para pedagang dalam mewujudkan kepentingannya.

1.5.5 Penelitian Relevan / Terdahulu

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta acuan dalam melaksanakan penelitian yang diperoleh dari buku, jurnal maupun makalah seminar. Penelitian relevan ini dapat menginformasikan mengenai hasil hasil studi yang berhubungan erat dengan topik yang diteliti oleh peneliti. Penelitian relevan ini juga berguna untuk menghubungkan studi yang akan dilakukan dengan studi studi sebelumnya dan dapat menghubungkan studi yang akan dilakukan dengan topik yang lebih luas lagi yang sedang dibicarakan (Afrizal, 2014)

Tabel 1. 1
Penelitian Relevan

NO.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nela Vera Septiani,	Eksistensi Pedagang	Perkembangan sektor pariwisata di	Membahas mengenai	Tujuan penelitian untuk

	Lucky Zamzami, Syahrial (2020)	Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat	Pantai Purus Padang memberikan banyak pengaruh, salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, ada permasalahan yang terjadi yaitu kebersihan di Pantai Purus tersebut.	Pedagang Kaki Lima Pantai Padang	menggambarkan perilaku pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang dan menganalisis kendala – kendala pedagang kaki lima dalam berdagang
2.	Riko Putra (2019). Skripsi Universitas PGRI Sumatera Barat.	Penolakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan PEMKO di Pasar Lubuk Buaya Padang	Penolakan yang dilakukan pedagang kaki lima di Pasar Lubuk Buaya yaitu, (1) tetap berjualan di area terlarang, (2) tarik menarik barang dagangan. tidak terstruktur.	Membahas mengenai Pedagang Kaki Lima Pantai Padang	Tujuan penelitian fokus pada faktor penyebab dan bentuk – bentuk penolakan pedagang kaki lima di Pasar Lubuk Buaya terhadap kebijakan pemerintah Kota Padang
3.	Fazga Oka (2018). Skripsi Universitas Andalas.	Pengelolaan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Dinas Pasar Kota Padang Di Pasar Bandar Buat	Pengelolaan dalam penataan PKL oleh Dinas Pasar Kota Padang yang telah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan Kota Padang belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan pengawasan dari Dinas Perdagangan Kota Padang beserta UPTD Pasar Bandar Buat.	Membahas mengenai Pedagang Kaki Lima Pantai Padang	Tujuan penelitian fokus pada pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Padang dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Bandar Buat Kota Padang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata – kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka – angka (Afrizal, 2014:13). Penelitian

ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Untuk menggali lebih dalam dengan memberikan analisis secara deskriptif dan gambaran fakta yang akurat, tepat, dan benar terkait realitas yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan dan mengumpulkan data berupa hasil wawancara serta melihat dan mendengar terkait perilaku kolektif PKL Pantai Padang mewujudkan kepentingan dalam penataan PKL.

1.6.2 Data yang Dikumpulkan

Data yang diambil pada penelitian ini yaitu data – data yang berhubungan dengan masalah penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh berupa informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian dilapangan. Data primer didapatkan menggunakan metode wawancara mendalam, teknik observasi dan pengumpulan dokumen. Dengan menggunakan tiga metode ini, peneliti mendapatkan data dan informasi – informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data primer yang diambil terkait dengan aktivitas – aktivitas yang dilakukan oleh PKL untuk mewujudkan kepentingannya, keberhasilan PKL mewujudkan kepentingannya dan perorganisasian para pedagang dalam mempengaruhi pemerintah Kota Padang.

Data sekunder adalah data untuk mendukung data primer. Misalnya, penelitian media cetak, elektronik, lewat orang lain atau dokumen, artikel, jurnal, skripsi ataupun foto – foto. Data sekunder tidak langsung sampai kepada pengumpul data. Tujuan lainnya untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Selain itu, data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap untuk membuat data benar – benar sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari buku, jurnal/artikel, skripsi,



media sosial (instagram), berita media massa yang berkaitan dengan PKL Pantai Padang, dokumen yang berhubungan dengan PKL Pantai Padang seperti, laporan kepolisian, surat perjanjian antara PKL dengan Sekretaris Daerah (Sekda), surat dukungan Komnas Ham, surat perintah tugas pamong, surat pengaduan tindak kekerasan dan surat meminta penjelasan kepada Walikota Padang.

1.6.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139). Menurut Moleong (2010:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Terdapat dua kategori informan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Informan Pelaku: informan yang memberikan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka merupakan subjek dari penelitian itu sendiri (Afrizal, 2014:139). Informan pelaku dalam penelitian ini adalah para PKL di Pantai Purus.

2. Informan Pengamat, informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini adalah orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang diteliti atau pelaku kejadian yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan *purposive* atau teknik disengaja. Teknik *purposive* adalah sebelum melakukan penelitian peneliti

menetapkan kriteria yang akan dijadikan sumber informasi. Kriteria informan pelaku dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a) PKL yang aktif dalam berjuang (ketika demonstrasi dan kunjungan kantor Pemerintah).
- b) PKL yang menolak untuk di relokasi ke lahan parkir Pantai Purus.
- c) PKL yang sudah berjualan makanan dan minuman 3 tahun di Pantai Purus yang di relokasi.
- d) PKL yang sudah mengambil lot namun tidak ke tempat relokasi.

Adapun kriteria informan pengamat yaitu sebagai berikut :

- a) Pejabat Dinas Pariwisata Kota Padang yang mengurus relokasi PKL Pantai Padang.
- b) Staf LBH Padang yang terlibat pendampingan PKL Pantai Padang.
- c) Staf Ombudsman RI Sumatera Barat yang menangani [elaporan PKL Pantai Padang.
- d) Ketua Karwil Komnas Ham Sumatera Barat yang menangani kasus PKL Pantai Padang.
- e) Beberapa orang yang memfasilitasi dialog antara PKL dengan Pemerintah Kota Padang



Berdasarkan kriteria di atas, berikut informan pekalu dan informan pengamat terlihat dalam tabel 1.2 yaitu :

**Tabel 1. 2
Informan Penelitian**

No.	Nama / Jenis Kelamin	Karakteristik	Kategori Informan
-----	----------------------	---------------	-------------------

1.	Desi / Perempuan	PKL yang aktif dalam berjuang (ketikademonstrasi dan kunjungan kantor Pemerintah).	Pelaku
2.	Rika Anggraini / Perempuan	PKL menolak relokasi	Pelaku
3.	Erlina / Perempuan	PKL menolak relokasi	Pelaku
4.	Warsinah / Perempuan	PKL menerima relokasi	Pelaku
5.	Rio / Laki – laki	PKL menerima relokasi	Pelaku
6.	Fifil / Perempuan	PKL menerima relokasi	Pelaku
7.	Yanti / Perempuan	PKL yang sudah mengambil lot namun tidak ke tempat relokasi	Pelaku
8.	Diko Eka Putra, S.STP., M.Si / Laki - laki	Kepala bidang destinasi dan daya tarik pariwisata	Pengamat
9.	Sultanul Arifin, S.Sos / Laki – laki	Ketua Kanwil Komnas Ham Sumatera Barat	Pengamat
10.	Dheka Arya Sasmita Suir, S.H., M.H. / Perempuan	Asisten Ombudsman RI Sumatera Barat	Pengamat
11.	Rozidateno Putri Hanida, S.IP., M.PA. / Perempuan	Dosen Administrasi Publik	Pengamat
12.	Alfi Syukri, S.H., M.H / Laki - laki	Advokat LBH Padang	Pengamat

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Wawancara mendalam perlu dilakukan berulang – ulang kali antara pewawancara dengan informan (Afrizal, 2014: 136). Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pertanyaan kunci (pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-pertanyaan

tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawabannya) (Afrizal, 2014: 21).

Dalam proses wawancara mendalam, penting bagi peneliti untuk tidak merasa cepat puas dengan informasi yang diberikan oleh informan, karena wawancara mendalam bersifat terbuka, tidak hanya dilaksanakan sekali atau dua kali, tetapi berulang – ulang kali, peneliti perlu mengecek dan mengklarifikasi informasi yang diperoleh dari informan (Bungin, 2001).

Wawancara mendalam dilakukan karena peneliti ingin memberikan kesempatan kepada informan untuk bercerita atau memberikan informasi mengenai aktivitas – aktivitas yang dilakukan oleh PKL untuk mewujudkan kepentingannya, keberhasilan PKL mewujudkan kepentingannya dan perorganisasian para pedagang dalam mempengaruhi pemerintah Kota Padang. Instrumen penelitian yang diperlukan adalah buku catatan lapangan, *handphone*, pedoman wawancara yang sebelumnya disiapkan atas arahan dari dosen pembimbing.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara terlebih dahulu dan mendiskusikannya dengan dosen pembimbing. Pedoman wawancara selesai dibuat pada tanggal 22 Februari 2024, tahap selanjutnya adalah turun lapangan dengan melakukan wawancara. Peneliti terlebih dahulu telah mengurus surat penelitian turun lapangan pada tanggal 16 Februari 2024. Selanjutnya, pada tanggal 23 Februari 2024 peneliti mengurus surat non perizinan penelitian skripsi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berlangsung selama 10 (sepuluh) hari. Pada tanggal 1 Maret melakukan wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mengetahui

PKL yang aktif demo dan meminta nomor telepon PKL tersebut. Wawancara dilakukan di kantor Lembaga Bantuan Hukum yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit.

Selanjutnya wawancara dengan PKL Pantai Purus yang menolak relokasi berlangsung selama dua hari pada tanggal 4 dan 10 Maret 2024. Hari pertama informan yang diwawancarai hanya satu orang pada tanggal 4 Maret 2024 wawancara bersama Ibu desi pada pukul 17.53 WIB. Pada tanggal 10 Maret 2024 wawancara bersama ibu Rika Anggraini pada pukul 17.45 WIB dan wawancara bersama ibu Erlina dilakukan pada pukul 18.30 WIB. Sebenarnya peneliti ingin melakukan wawancara kedua pada tanggal 5 maret 2024 namun dikarenakan sering terjadi hujan menjelang sore hari yang mengakibatkan PKL tidak bisa berjualan maka dari itu penelitian dapat dilaksanakan kembali pada tanggal 10 Maret 2024. Sebelumnya peneliti melakukan wawancara pada tanggal 4 Maret 2024, peneliti sudah berkomunikasi terlebih dahulu melalui aplikasi *whatsapp* dengan PKL yang aktif dalam berjualan dan peneliti meminta kesediaan informan untuk diwawancarai. Informan mengatakan bersedia untuk diwawancarai, peneliti pun langsung diarahkan untuk bertemu langsung dengan informan di tempat berjualan yaitu tepi pinggir Pantai Purus, lama wawancara sekitar 60 menit. Pada tanggal 10 Maret peneliti mendatangi langsung tempat berjualan informan dan meminta kesediaan informan untuk diwawancarai, lama wawancara antar 30 – 60 menit. Proses turun lapangan dimulai kembali, pada tanggal 16 Maret 2024 peneliti melakukan wawancara dengan PKL Pantai Purus yang direlokasi ke lapangan parkir Pantai Purus, peneliti mendatangi langsung tempat berjualan informan di lapangan parkir

Pantai Purus dan meminta kesediaan informan untuk diwawancara, lama wawancara antar 30 menit. Wawancara bersama ibu Warsinag dilakukan pada pukul 14.30 WIB, wawancara dengan Rio dilakukan pada pukul 15.00 WIB, wawancara dengan ibu Fiful dilakukan pada pukul 15.30 WIB dan wawancara dengan ibu Yandi dilakukan pada pukul 17.00 WIB.

Penelitian selanjutnya dilakukan wawancara di kantor Komnas Ham pada tanggal 25 Maret 2024 bersama Bapak Sultanul Arifin ketua Komnas Ham Kanwil Sumatera Barat pada pukul 10.50 WIB. Wawancara di kantor Dinas Pariwisata bersama bapak Diko Eka Putra, S.STP., M.Si kepala bidang destinasi dan daya tarik pariwisata pada tanggal 3 April 2024 pada pukul 07.30 WIB. Wawancara di kantor Ombudsman RI Sumatera Barat bersama Ibu Dheka Arya Sasmita Suir, S.H., M.H asisten Ombudsman RI Sumatera Barat pada tanggal 17 April 2024 pada pukul 14.00 WIB. Selanjutnya wawancara di kantor LBH Padang dengan Alfi Syukri, S.H., M.H advokat LBH Padang pada tanggal 18 April 2024 pada pukul 15.00 WIB. Selanjutnya wawancara dilakukan di rumah informan yaitu Ibu Rozidateno Putri Hanida, S.IP., M.PA dosen Administrasi Publik pada pukul 16.30.

Setelah wawancara selesai peneliti melanjutkan dengan mentranskrip hasil wawancara. Setelah itu peneliti mulai membuat pembahasan penelitian dan mengklasifikasikan data. Dalam pembuatan pembahasan penelitian, peneliti menemukan kekurangan informasi yang menyebabkan peneliti harus mewawancarai kembali informan penelitian, yaitu Ibu desi.

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berdasarkan pedoman wawancara dan dikembangkan pada saat wawancara dilakukan, peneliti juga

merekam dan membuat catatan lapangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi mengenai aktivitas – aktivitas yang dilakukan oleh PKL untuk mewujudkan kepentingannya, keberhasilan PKL mewujudkan kepentingannya dan perorganisasian para pedagang dalam mempengaruhi pemerintah Kota Padang.

2. Observasi

Peneliti juga melakukan observasi. Peneliti melakukan observasi participant. Peneliti melihat dan mendengar langsung pelayanan yang diberikan oleh PKL Pantai Purus yang direlokasi. Hal tersebut peneliti lakukan pada tanggal 17 Desember 2023, peneliti melihat langsung bagaimana pelayanan PKL Pantai Purus yang direlokasi ke Pasar Kuliner. Pada saat itu peneliti pergi berjalan sore di trotoar Pantai Purus, karena telah ada PKL yang berjualan di tempat perelokasian, jadi peneliti duduk di Pasar Kuliner tersebut. Ketika peneliti belum sampai ke Pasar Kuliner, peneliti langsung di datangi PKL yang berlari ke peneliti. PKL meminta peneliti untuk duduk di tempat jualannya mereka. Lalu, peneliti memesan makanan dan minuman yaitu mie rebus dan juga nutrisari. Harga makanan yang dijual PKL juga tidak mahal standar dari harga lima ribu hingga lima belas ribu.

Kemudian, pada bulan April setiap hari sabtu dan minggu peneliti melihat beberapa PKL buka lebih awal dikarenakan pagi hari itu pengunjung jogging di area Pantai Padang. Namun, pada hari senin – jumat PKL tetap buka seperti biasa yaitu jam 16.00 WIB. Hal ini peneliti lihat selama dua minggu berturut – turut. dan memang kebanyakan PKL buka lebih awal.

3. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan dari informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka lebih akurat dalam surat atau dokumen daripada hasil wawancara mendalam. (Afrizal, 2014: 21).

Menurut (Sugiyono, 2007:240) bentuk – bentuk dokumen diantaranya adalah dalam bentuk tulisan seperti biografi, peraturan dan kebijakan. Selain itu dalam bentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan data dari dokumen yang terkait dengan permasalahan aktivitas – aktivitas yang dilakukan oleh PKL untuk mewujudkan kepentingannya, keberhasilan PKL mewujudkan kepentingannya dan perorganisasian para pedagang dalam mempengaruhi pemerintah Kota Padang. Dokumen ini dikumpulkan dengan cara di fotocopy, foto menggunakan kamera Hp dan juga melalui media sosial (Instagram). Peneliti juga mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

1.6.5 Unit Analisis

Dalam penelitian, unit analisis membantu memfokuskan kajian penelitian yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, subjek penelitian ditetapkan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Dari unit analisis diperoleh data, dalam arti kepada siapapun atau apa, dan proses pengumpulan data diarahkan. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara, dan komunitas). Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok, PKL sebagai suatu kesatuan sosial.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian – bagian dan saling berkaitan antara bagian – bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktivitas yang dilakukan oleh seorang peneliti pada saat menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok – kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok – kelompok. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus – menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman yang membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Kodifikasi Data

Pada tahap ini peneliti menulis ulang catatan – catatan lapangan yang dibuat saat wawancara dengan informan, Setelah itu, peneliti memilih informasi yang penting dan yang tidak penting tentunya dengan cara memberikan tanda – tanda. Hasil kegiatan pada tahap pertama adalah diperolehnya tema -tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema – tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti.

2. Tahap Penyajian

Tahap ini adalah tahap lanjutan analisis untuk menyajikan temuan berupa kategori atau pengelompokkan. Miles dan Huberman menganjurkan menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian lebih efektif.



3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Peneliti akan menginterpretasi atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, penulis kemudian mengecek lagi kesahihsan interpretasi data dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan

Analisis data dilakukan mulai dari awal sampai akhir penelitian dimana data sudah dapat dikatakan jenuh. Data yang dianalisis berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang telah dielaborasi ke dalam catatan lapangan sebagai bahan mentah untuk melakukan analisis. Data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi penulis dengan dukungan data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Analisis dilakukan mulai dari melakukan penamaan terhadap bagian yang diklasifikasikan. Setelah itu, penamaan tersebut dijelaskan dan disajikan secara rinci. Untuk yang terakhir, peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6.7 .Definisi Operasional Konsep

Definisi operasional konsep dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Peneliti menurunkan indikator berdasarkan kerangka konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:

1. Perilaku Kolektif adalah tindakan bersama yang dilakukan oleh PKL Pantai

Padang.

2. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan.
3. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berjualan tidak menggunakan tempat berjualan permanen dan berjualan di sepanjang dengan cara menebar dagangan atau gerobaknya di pinggir jalan.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian, merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu kepada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah Jl. Samudera Purus, Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian agar berjalan dengan efektif dan efisien, maka dibuat jadwal penelitian sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dari penelitian. Penelitian dilakukan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Januari 2024 sampai bulan Juni 2024 Berikut jadwal penelitian dalam penulisan skripsi ini:

Tabel 1. 3

Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2024						
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli

1.	Bimbingan Membuat Pedoman Wawancara						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Analisis data						
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi						
5.	Ujian Skripsi						

